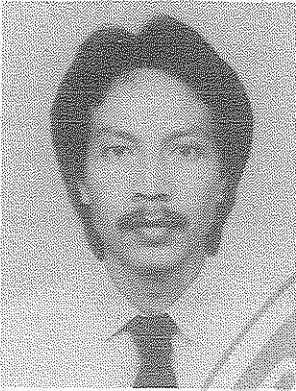


065

KOMENTAR



Kegagalan Teori Rente Ekonomi Hutan: Sebuah Tanggapan

Sairia Astana

SEBELUM menanggapi tulisannya, "Kegagalan Teori Rente Ekonomi Hutan", dalam Majalah Prisma No. 2, Bulan Februari 1995, berkenankanlah saya mengucapkan Selamat kepada penulisnya, Hariyadi Kartohihardjo, atas tulisannya. Karena kenyataannya, tidak banyak Rimbawan sebagaimana Saudara Hariyadi yang "berani" mencoba menganalisis tentang pemanfaatan hutan alam melalui sistem HPH dari sisi ekonomi kelembagaan. Ini barangkali karena sistem kelembagaan HPH yang ada telah dianggap "mapan" oleh beberapa kalangan dalam pengertian bahwa sistemnya seolah "sengaja" dipertahankan agar *free riders* dapat hidup secara leluasa. Terlepas dari situasi yang ada, tulisannya menarik untuk ditanggapi.

Secara keseluruhan pandangan Saudara Hariyadi cukup valid. Tetapi, ada satu pandangan (*thesis*) yang perlu diulas. Pandangan tersebut adalah bahwa bila kondisi tanpa kejelasan *property right* atas *standing stock* menyebabkan HPH memiliki sifat *decreasing cost*, maka tanpa memperbaiki kelembagaan yang ada, HPH akan selalu membentuk struktur pasar monopoli (*hal. 53*). Tesis ini didasarkan pada suatu pengertian bahwa perusahaan yang bersifat *increasing return* atau *decreasing cost to scale* kompatibel dengan pasar monopoli dan tidak kompatibel dengan pasar bersaing.

Tulisan ini menanggapi persoalan yang berkaitan dengan pandangannya bahwa *long run average cost* HPH bukan *increasing cost*, melainkan *decreasing cost to scale*. Dari penjelasan Saudara Hariyadi, saya merasakan bahwa dari sisi kerangka teorinya, tesis tersebut agak *bias*. Ini terutama, jika alasan saya dapat diterima, berakar dari kerancuan pengertian antara bentuk U kurva AC dalam *short run* dan dalam *long run*. *Decreasing cost to scale* yang dimaksud sebenarnya *decreasing cost to scale* yang "semu", sebab yang terjadi sebenarnya dampak "subsidi" yang berlebihan. Karena itu dalam struktur pasar apapun, pengusahaan hutan dengan sistem HPH, pada dasarnya tidak menguntungkan kecuali "tersubsidi".

Konsep Umum Biaya Produksi

Dalam teori ekonomi mikro, kita diperkenalkan pada konsep biaya produksi. Konsep ini memberikan alat analisis bagaimana seorang ekonom (bukan pengusaha) mencoba mengamati perilaku produsen atau pengusaha (bukan ekonom) dalam menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.

Dalam analisis tersebut, kita diperkenalkan dengan konsep-konsep seperti *Marginal Cost* (MC), *Variable Cost* (VC), *Fixed Cost* (FC), *Average (Total) Cost* (ATC/AC), dan seterusnya. Menurut konsep biaya produksi,

produsen akan memproduksi dengan volume (sebesar) saat kondisi *maximizing profit* dicapai yaitu pada saat $MC = p$ (harga pasar barang atau jasa yang diproduksi). Dari konsep ini, kita dapat menurunkan kurva *supply* (penawaran) yang tidak lain adalah kurva MC itu sendiri.

Berdasarkan konsep tersebut, dalam *short run* produsen akan memproduksi selama harga pasar berada di atas VC . Tetapi dalam *long run*, karena sifat FC berubah menjadi VC , maka kita menggunakan AC sebagai tolok ukurnya. Dalam *long run*, produsen akan memproduksi selama harga sama dengan AC (*normal profit*). Kecenderungan perilaku produsen tersebut terjadi dengan asumsi pasar dalam kondisi bersaing.

Bentuk U Kurva AC : Short Run

Bentuk U kurva AC dalam *short run* dan dalam *long run*, memiliki alasan yang berbeda. Bentuk U kurva AC dalam *short run* terbentuk karena hukum "*diminishing return*". Hukum ini menyatakan bahwa "kalau adanya pertambahan *variable factors* digunakan secara kombinasi dengan *fixed factors*, maka *marginal* dan *average product* akhirnya akan menurun". Dalam hukum ini secara jelas disebutkan adanya *fixed factor*, yang dalam *long run*, dianggap *variable factor*. Dengan demikian, dalam *short run*, perubahan output dapat diatur dengan cara mengubah *variable factor* dalam kondisi penggunaan *fixed variable* tertentu.

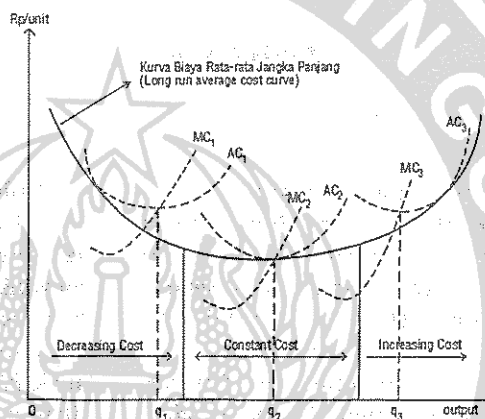
Konsep tersebut cukup berguna sebagai alat analisis tentang perilaku apakah suatu perusahaan atau agregat perusahaan atau industri akan tetap memproduksi jika terjadi perubahan harga yang terbentuk dalam pasar bersaing. Misalnya, kita dapat memahami bahwa dalam suatu industri tertentu, dalam *short run*, bisa saja terjadi satu perusahaan gulung tikar, sementara yang lain tidak, karena per-

usahaan yang disebut pertama, barangkali memang kurang efisien dibandingkan dengan yang disebut terakhir.

Bentuk U Kurva AC : Long Run

Dalam *long run*, hukum *diminishing return* tidak dapat digunakan dalam menjawab kenapa bentuk U kurva AC dalam *long run* terjadi. Sebab, sebagaimana telah diutarakan, dalam *long run*, semua faktor merupakan *variable factors*. Perubahan *average* dan *mar-*

GAMBAR 1. Kurva Biaya Rata-rata Jangka Panjang (Long run average cost curve)



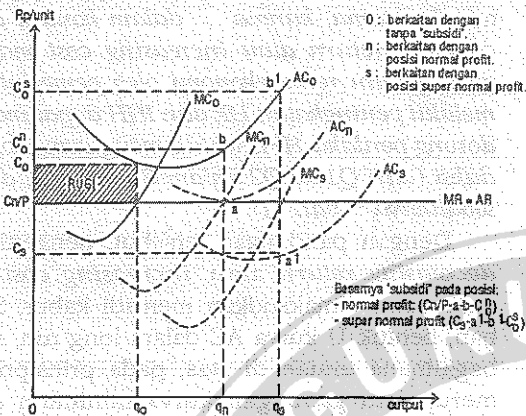
KETERANGAN (remarks):

Yang penting diperhatikan pada Gambar 1 adalah : (1) Long run AC curve, merupakan garis hubung titik-titik *short run* minimum AC , dan (2) Dalam *long run*, apakah AC minimum pada tingkat output tertentu ($AC_1/AC_2/AC_3$) akan sama atau tidak dengan AC minimum pada tingkat output lain ($AC_1/AC_2/AC_3$), secara alami *returns to scale* yang akan menentukan sebagai akibat proses perkembangan teknologi dan proses belajar. Bentuk U kurva biaya pasti terbentuk selama : (1) Sumberdaya bersifat terbatas, dan (2) *Life cycle* produk atau industri yang bersangkutan memungkinkan.

marginal productivities-nya bukan karena proporsi faktor produksi yang digunakan, melainkan karena perubahan dalam skala operasi atau usaha (*scale of operation*). Dengan kata lain, terjadinya bentuk U kurva AC dalam *long run* berkaitan dengan perubahan teknologi dan proses belajar, dan bukan dalam kaitannya dengan hukum *diminishing return* sebagaimana dalam *short run*. Secara grafis, bentuk U kurva AC dalam *long run* dapat diperiksa pada Gambar 1.

Bentuk U kurva AC dalam *long run* pada prinsipnya merupakan garis hubung dari titik-titik yang terbentuk dari minimum AC dalam *short run*. Perkembangan minimum

GAMBAR 2. Biaya Produksi Sistem HPH Dalam Kondisi Bersaing Sempurna (Production cost of HPH system under perfect competition)



KETERANGAN (remarks) :

Thesis pokok : Selama status keradaan hutan produksi alam masih memungkinkan terjadinya akses terbuka, usaha pemanfaatan hutan alam pasti rugi kecuali "tersubsidi". Dalam long run, adanya "subsidi" menyebabkan dua kemungkinan : (1) Pengusaha dalam posisi normal profit, dan (2) Pengusaha tetap dalam posisi supernormal profit sebagaimana dalam short run. Karena hanya dapat bekerja kalau "tersubsidi", maka jelas akan bubar bila menghadapi pasar bebas (di mana fasilitas subsidi tidak dipertahankan). Implikasinya, setiap program atau peraturan pemerintah yang diarahkan agar pengusaha HPH memperbaiki sistem pengelolannya pasti akan terhambat atau gagal dengan sendirinya. Sebab, setiap program atau peraturan pemerintah tersebut pada prinsipnya akan menggeser MC dan AC ke kiri-atas.

AC dalam periode waktu tertentu dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan proses belajar. Pada periode waktu (dengan kemajuan efisiensi) tertentu, setiap individu atau agregat perusahaan atau industri akan tetap memproduksi pada tingkat kuantitas tertentu saat $MC=p$ atau saat *maximizing profit* tercapai, karena ini merupakan prinsip rasional suatu usaha ekonomi.

Dalam periode ekspansi produksi, perbedaan yang terjadi hanya perbedaan minimum AC-nya saja. Misalnya, pada tahun x dan output naik sebesar Z, minimum AC-nya mungkin sebesar (A/unit), tetapi pada tahun (x+1) di mana output misalnya juga naik sebesar Z, minimum AC-nya mungkin sebesar (A-b/unit). Minimum AC-nya akan konstan sebesar (A-b/unit), kalau saat output naik lagi sebesar Z, industri dalam kondisi sedang menuju ke kemandegan teknologi (tidak terjadi kemajuan efisiensi secara berarti). Dan saat benar-benar tidak ada kemajuan efisiensi, minimum AC-nya tentunya akan naik misalnya sebesar (A-b+a/unit) ketika output terus naik sebesar Z. Ketiga fenomena ini, menurut Teori Biaya Produksi, berturut-turut

dinamakan periode atau "daerah" *decreasing cost*, *constant cost* dan *increasing cost to scale* dari suatu industri.

Dalam *long run*, secara hipotetik, kita dapat membuat skenario perilaku industri tertentu. Tetapi, skenario ini tentunya harus dibuat atas dasar perkembangan teknologi yang semakin mampu meningkatkan efisiensi sampai batas maksimalnya, sehingga belum tersedia lagi upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan yang telah dicapai. Dengan kata lain, kita dapat mengemukakan bahwa bentuk U kurva AC dalam long run secara alami akan selalu terjadi. Dalam *short run*, itu tidak mungkin terjadi (belum terjadi perubahan teknologi dan atau proses belajar); walaupun, dalam *medium run*, mungkin saja bisa terbentuk.

Terbentuknya bentuk U kurva AC dalam *long run*, tidak terkait dengan apakah pada saat awalnya, suatu individu atau agregat perusahaan atau industri berproduksi pada tingkat yang paling efisien atau yang kurang efisien, atau yang paling tidak efisien sekalipun. Dalam *long run*, yang terjadi adalah berapapun tingkat efisiensi yang dicapai pada awalnya, bentuk U kurva AC secara alami akan terbentuk. Walaupun, secara empirik mungkin tidak selalu bisa dibuktikan karena industri yang bersangkutan, misalnya, telah "uzur" sebelum kurva *increasing cost*-nya terbentuk. Ini bisa terjadi, misalnya, karena munculnya substitusi yang lebih disukai konsumen. Sebagai contoh, bentuk U kurva AC jenis produk TV-Hitam-Putih, barangkali belum pernah terbentuk, sebab mungkin selama dalam *increasing return* atau *decreasing cost to scale*, telah ditemukan TV-Berwarna, dan TV-Hitam-Putih tidak diproduksi lagi.

Dari uraian tersebut, yang perlu dipertanyakan dalam kaitannya dengan bentuk U kurva AC dalam *long run* adalah, apakah (atau kapan) nasib AC suatu industri tertentu, berada dalam *decreasing cost*, *constant cost*

atau *increasing cost to scale*? Walaupun, dengan kemajuan teknologi elektronika yang semakin cepat, boleh jadi bentuk U kurva AC dalam long run tidak pernah "terbentuk" dalam pengertian selalu terjadi *decreasing cost to scale*, karena kenaikan tingkat efisiensi selalu dapat diupayakan. Tetapi, ini tentunya hanya akan terjadi kalau sumberdaya yang tersedia tidak terbatas.

Dalam kondisi sumberdaya yang terbatas, sebagaimana kita mengenalnya dalam konsep *Pareto Optimum*, kemajuan teknologi dalam meningkatkan efisiensi pasti akan mengalami kemandegan pada suatu periode tertentu, dan baru akan bergerak lagi setelah terdapat pengurangan alokasi sumberdaya lain. Sebagai contoh, kalau di negara-negara berkembang, sektor perumahan dan bangunan sedang dalam *growth stage*, industri alat berat tentunya akan cenderung diarahkan untuk mengisi pasar sektor perumahan dan bangunan, sementara untuk sektor eksploitasi hutan pasti akan direm, selama sektor perumahan dan bangunan relatif lebih menguntungkan. Dengan kata lain, sumberdaya untuk memproduksi alat berat lebih diintensifkan bagi alat berat yang dibutuhkan oleh sektor perumahan dan bangunan. Implikasinya, kemajuan efisiensi di sektor eksploitasi hutan akan cenderung mandeg, sementara di sektor perumahan dan bangunan terus berkembang. Tetapi tidak demikian, bila sumberdaya untuk produksi alat berat tidak terbatas.

Implikasi Bentuk U Kurva AC

Berkaitan dengan penggunaan bentuk U kurva AC, saya menilai bahwa Hariyadi kurang jelas dalam menerapkan pengertiannya ke dalam permasalahan yang dianalisis. Misalnya, tatkala sewaktu membahas konsep AC dalam kaitannya dengan upaya menaikkan DR dan IHH, timbul pertanyaan, apakah bentuk U kurva AC yang dimaksudkan itu dalam *long run* atau *short run*? Sebab, kendati dalam menurunkan daerah *decreasing return to scale* telah menggunakan konsep bentuk U kurva AC dalam *long run* (*return to scale*), tetapi dalam melihat implikasinya cenderung memaknai pengertian konsep bentuk U kurva AC

dalam *short run* (*diminishing returns law*). Ini misalnya terlihat dari salah satu pandangannya: "*pertama, karena dalam kondisi decreasing return atau increasing cost maka peningkatan rente ekonomi oleh pemerintah melalui peningkatan DR dan IHH dapat mendorong perilaku HPH untuk mengurangi produksi (dari Q1 ke Q2 dalam Gambar 1), dan sebaliknya*" (hal. 51).

Dengan pandangan tersebut, pengertian *decreasing return* atau *increasing cost to scale* yang dimaksudkan menjadi kabur. Sebab, bentuk U kurva AC dalam long run, sebagaimana uraian di atas, pada prinsipnya merupakan gabungan kurva minimum AC dalam *short run*. Dalam kasus *decreasing return to scale*, mengindikasikan bahwa industri sedang dalam kondisi tidak berpeluang untuk ekspansi produksi, karena perkembangan teknologi dan manajemen sedang dalam kondisi yang menurun, sehingga cenderung relatif kurang atau tidak efisien.

Jika kondisi tersebut yang dijadikan dasar (asumsi) untuk menurunkan produksi kayu bulat, tentunya kurang beralasan. Dalam kondisi *increasing cost*, seorang ekonom tentu sudah dapat merasakan bahwa akan banyak pelaku ekonomi keluar dari suatu industri. Kebijakan yang dapat menimbulkan kenaikan biaya seperti menaikkan DR dan IHH, seharusnya dihindari, karena hanya akan mempercepat pelaku ekonomi keluar dari industri. Padahal, sebaliknya, yang diinginkan oleh kebijakan kenaikan DR dan IHH adalah, berkurangnya volume produksi, bukan keluarnya pelaku ekonomi. Sebab, keluarnya pelaku ekonomi, berarti timbulnya masalah sosial dan pengangguran.

Menurut konsep biaya produksi, upaya menurunkan volume produksi kayu bulat dari Q1 ke Q2 (*Gambar 1, hal. 50*), tidak diperlukan asumsi bahwa industri harus dalam kondisi *increasing cost to scale*. Dalam kondisi *constant* ataupun *decreasing cost to scale*, produksi kayu bulat tetap dapat menurun dari Q1 ke Q2 bila DR dan IHH dinaikkan. Sebaliknya, kebijakan penekanan produksi kayu ini seharusnya justru dilakukan sewaktu industri dalam kondisi *decreasing cost*. Sebab, dalam kondisi tersebut perusahaan HPH sedang berkesempatan untuk ekspansi. Adanya kebi-

jakan kenaikan DR dan IHH dengan demikian tidak dikhawatirkan akan menyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar. Ini berarti kebijakannya dapat berjalan secara efektif dalam mengantisipasi ekspansi produksi yang berlebihan. Walaupun demikian, saya kurang sependapat pendekatan fiskal ini dapat efektif jika dipakai sebagai alat pengendalian produksi kayu hutan alam.

Sekali lagi, implikasi pengertian *return to scale* berbeda dengan pengertian *diminishing return*. Sebagaimana uraian di atas, *return to scale* berkaitan dengan nasib AC dalam *long run* sebagai akibat perkembangan efisiensi karena perubahan teknologi dan proses belajar, tetapi hukum *diminishing return* berkaitan dengan nasib AC dalam *short run* sebagai hukum yang berlaku dalam penggunaan faktor produksi.

Decreasing Cost to Scale?

Saudara Hariyadi mengemukakan bahwa kondisi AC industri HPH dalam *long run* berada dalam kondisi *decreasing cost to scale*. Menanggapi kesimpulan ini, pertama-tama yang timbul dalam pikiran saya adalah pertanyaan, bagaimana kita harus mengartikan istilah *long run* yang dimaksudkan? Apakah sejak sistem HPH berlaku hingga saat ini, atau hingga nanti di masa mendatang? Kalau yang dimaksudkan adalah sejak sistem HPH berlaku hingga saat ini, saya masih bisa memahami pandangan ini, kendati saya menyimpan beberapa pertanyaan mendasar. Tetapi kalau hingga waktu tertentu di masa mendatang, saya mungkin berbeda pandangan. Sebab, kecenderungannya masih sulit dideteksi selama hutan alam masih dalam akses terbuka. Dugaan bahwa *decreasing cost to scale* akan berjalan hingga waktu tertentu di masa mendatang berkaitan dengan, selain perkembangan teknologi dan proses belajar, juga dengan daya tarik investasi di sektor kehutanan.

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut, saya cenderung berpendapat bahwa kalau pun kemungkinan *decreasing cost to scale* terjadi, itu hanya akan terjadi hingga kini, dan tidak berlaku hingga waktu tertentu di masa mendatang. Kalau hingga kini, peluang terjadinya *decreasing cost to scale* masih be-

sar. Di samping karena potensi hutan relatif masih baik, juga karena *policies* masih mendukung. Tetapi, kalau hingga masa mendatang, masih mengundang banyak pertanyaan (yang jawabannya belum pasti). Misalnya, apakah *logged-over* area akan kembali bisa dieksploitasi, apakah *integrated industries* masih mendapatkan fasilitas subsidi, apakah sektor perkebunan masih menarik investor alat berat, selain apakah hutan produktif yang tersedia masih memungkinkan terwujudnya ekspansi?

Jika kondisi *decreasing cost to scale* terjadi, ini harus dengan suatu pengertian bahwa kondisinya benar-benar tercipta sebagai akibat perubahan teknologi dan proses belajar. Kalau suatu industri hutan (HPH) sedang dalam *decreasing cost to scale*, maka industri tersebut memiliki kesempatan yang longgar untuk ekspansi produksi. Dengan kata lain, ia dapat mengubah *scale of operation*-nya menjadi lebih besar dalam rangka memanfaatkan peluang efisiensi (ekonomi) yang timbul (perubahan teknologi, manajemen, proses belajar, dan lain-lain), dan bukan dalam rangka *maximizing profit* (dalam pengertian *short run* atau *diminishing returns law*). Sebab, dalam kondisi *decreasing cost to scale*, setiap penambahan investasi baru berarti tambahan produksi akan menimbulkan tambahan biaya yang relatif lebih kecil daripada tambahan nilai output yang terbentuk (karena tambahan *variable factors* atau investasi baru tersebut).

Dalam kasus HPH di mana status salah satu *variable factor*-nya yang berupa *standing stock* hutan, hak-hak "kepemilikannya" (*property rights*-nya) tidak jelas, saya berpendapat bahwa kemungkinan untuk ekspansi produksi (karena *decreasing return to scale*) akan terbentur dengan pemenuhan bahan baku; dalam hal ini, hutan produktif yang bisa dieksploitasi. Jatah produksi atau luas tebangan yang diatur dalam RKT tidak selalu menyatu dengan rencana perusahaan dalam rangka ekspansi. Ini tentunya merangsang tindakan pembabatan hutan secara illegal. Untuk itu, saya cenderung berpandangan bahwa satu salah pertanyaan yang perlu diajukan dalam pembuktian apakah betul terjadi *decreasing cost to scale* atau tidak adalah

apakah benar penebangan hutan secara illegal selalu mencerminkan indikasi adanya atau berkaitan dengan *decreasing cost to scale*? Jika tidak, berarti dalam pembuktian *decreasing cost to scale* kita harus mampu membedakan tipologi kayu illegal akibat *decreasing cost to scale* dan akibat lain. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya hal itu dapat dilakukan?

Dari penjelasan tersebut, dapat dimengerti mengapa banyak perusahaan HPH yang "over investment". Bila temuan ini dapat diverifikasi, hal itu dapat mengindikasikan adanya *decreasing cost to scale*. Tetapi ada kemungkinan "over investment" yang terjadi, sebenarnya bukan didorong oleh kondisi *decreasing cost to scale* (karena perkembangan teknologi dan proses belajar), melainkan oleh berbagai

dikenakan (IHPH, IHH, DR, dan lain-lain) dan formal tidak langsung (seperti kebijakan larangan/pembatasan ekspor log dan kayu gergajian dan lain-lain), tetapi juga dari sisi non-formal seperti faktor peluang dapat mencuri kayu di luar RKT dan faktor "kolusi" (seperti "pelonggaran" pelaksanaan peraturan maupun peraturan yang "bias" dan lain-lain).

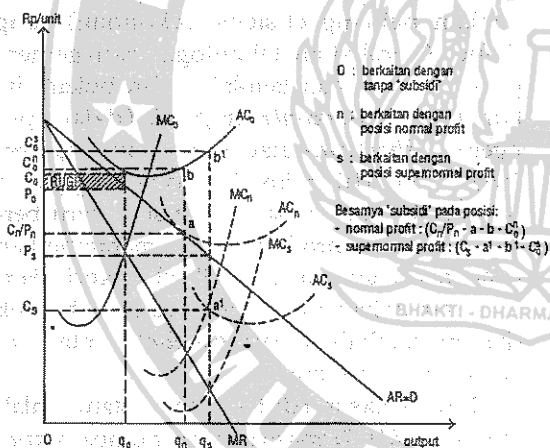
Hipotesis saya, kemajuan efisiensi yang terjadi sebenarnya relatif lebih kecil daripada besarnya "subsidi" yang diterima. Sekedar sebagai ilustrasi, dari kebijakan larangan ekspor log dan kayu gergajian saja telah memungkinkan perusahaan yang terintegrasi (*integrated Industries*) mampu mengendalikan harga log dan kayu gergajian dalam negeri, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai upaya peningkatan daya saing ekspor kayu

olahannya. Untuk itu, saya cenderung berpendapat bahwa *decreasing cost to scale* yang dimaksudkan sebenarnya adalah kondisi *decreasing cost to scale* yang "semu".

Peluang "rendahnya" AC perusahaan HPH sebenarnya karena dampak "subsidi" yang berlebihan. Indikasinya, dengan semakin ditegakkannya peraturan perundangan tentang kelestarian seperti TPTI dan lain-lain, banyak perusahaan HPH yang cenderung tidak mampu (bukan tidak mau) melaksanakannya. Ini terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah HPH yang dicabut izinnya (baik yang masa konsesinya sudah maupun belum habis). Dilaporkan bahwa dari 541 HPH, hanya 54 HPH yang "sukses" memperpanjang konsesinya, sementara 84 HPH telah dicabut izinnya dan sisanya 403 HPH di dalamnya PT. INHUTANI masuk sebagai pemegang saham.¹

Pada Gambar 2, 3 dan 4 kita dapat mengetahui bahwa tanpa adanya "subsidi", maka perusahaan HPH akan rugi atau

GAMBAR 3. Biaya Produksi Sistem HPH Dalam Kondisi Monopoli (Production cost of HPH system under Monopoly)



KETERANGAN (remarks):

Komentar pada Gambar 3 sama dengan Gambar 2. Yang terpenting pada Gambar 3 adalah, bahwa dalam long run, kondisi monopoly tidak selalu menempatkan pengusaha dalam posisi supernormal profit, tetapi juga bisa dalam posisi normal profit. Sebagaimana dalam kondisi bersaing sempurna, dalam kondisi monopoli, pengusaha HPH bisa bubar bila "subsidi" tercabut. Karenanya, setiap program maupun peraturan pemerintah yang diwajibkan kepada HPH agar pengusaha HPH memperbaiki performanya, pasti juga akan terhambat atau gagal dengan sendirinya. Sebab, setiap program atau peraturan pemerintah tersebut pada prinsipnya akan menggeser MC dan AC ke kiri-atas.

fasilitas "subsidi" yang tersedia. Dalam kasus perusahaan hutan alam, di mana kondisinya masih memungkinkan terjadinya akses terbuka, saya cenderung mengartikan istilah "subsidi" di sini, tidak saja dari sisi formal langsung seperti rendahnya iuran/pungutan yang

1. Majalah *Hukum dan Demokrasi* Forum No. 2 Tahun IV, 11 Mei 1995.

bangkrut. Tetapi, adanya peluang "subsidi" memungkinkan perusahaan HPH dapat bekerja, yang dalam *long run*, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, pada tingkat harga tertentu, dia bekerja dalam posisi *normal profit*, sehingga minimum AC sekedar bersinggungan dengan harga. Kedua, pada tingkat harga tertentu, dia bekerja dalam posisi *supernormal profit*. Banyak kalangan berpendapat bahwa alternatif kedua yang mendekati realita.

Hal yang disebut terakhir menimbulkan pertanyaan, kenapa dalam *long run* masih saja dalam posisi *supernormal profit*? Jawabannya tidak lain adalah, karena faktor "subsidi" seolah-olah "sengaja" dipertahankan. Salah satu indikasinya adalah, tidak terbukanya secara luas informasi mengenai bagaimana mendapatkan konsesi HPH. Dengan kata lain, proses *entry* dan *exit* dalam *long run* tidak terjadi. Sekali lagi, itulah sebabnya kenapa saya cenderung mencurigai kebenaran *decreasing cost to scale*. Sebagaimana telah didiskusikan, hal itu merupakan *decreasing cost to scale* yang "semu", karena yang terjadi sebenarnya, dampak faktor "subsidi" yang berlebihan.

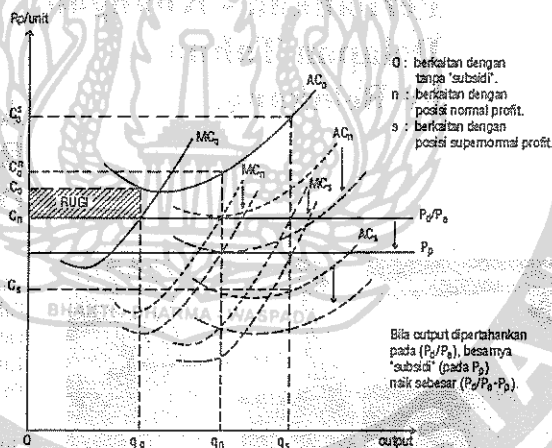
Upaya Pelestarian Hutan Produksi Alam

Berdasarkan kerangka teori di atas, saya cenderung sependapat dengan Saudara Hariyadi bahwa baik program maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan sistem HPH pasti akan terhambat (gagal?) dengan sendirinya (*bal. 53*). Selain itu program dan peraturan pemerintah tersebut harus perusahaan HPH yang melaksanakannya. Alasannya adalah setiap pelaksanaan program maupun penegakan peraturan berarti pengurangan "subsidi" yang diterima oleh industri hutan. Dan setiap pengurangan "subsidi", berarti pengurangan keuntungan (yang bekerja pada posisi *supernormal profit*) dan atau industri hutan harus gulung tikar

(yang bekerja pada posisi normal profit). Saya kurang sependapat bahwa baik upaya menurunkan maupun menaikkan rente ekonomi hutan (DR dan IHH), berkaitan dengan persoalan upaya pelestarian (mengerem produksi kayu hutan alam). Hal tersebut baru akan berkaitan jika dan hanya jika dalam pengusahaan hutan dengan sistem HPH tidak terdapat biaya eksklusi. Dengan kata lain, kepastian usaha dan keuntungan dari pengusahaan hutan melalui sistem HPH telah terjamin.

Walaupun demikian, bukan berarti untuk melestarikan hutan alam lantas faktor "subsidi" diberantas. Tindakan ini, sebagaimana terlihat pada Gambar 2, 3 dan 4, hanya akan menyebabkan perusahaan HPH gulung tikar (sebagaimana bila ia menghadapi pasar atau perdagangan bebas) atau merangsang mere-

GAMBAR 4. Biaya Produksi Sistem HPH Dalam Kondisi Monopsoni (Production cost of HPH system under Monopsony)



KETERANGAN (remarks):

Komentar pada Gambar 4 juga sama dengan Gambar 2. Yang terpenting pada Gambar 4 adalah, kondisi yang dihadapi adalah market demand yang monopsoni. Harga bukan dikendalikan oleh produsen tapi oleh konsumen, yang dalam hal ini, grup-grup perusahaan industri pengolahan kayu. Proses pengendaliannya dipertajam dengan adanya kebijakan larangan/pembatasan ekspor log. Dengan demikian, pada Gambar 4, kita mengenal P_e (Harga pasar bebas ekspor), P_d (Harga pasar bebas dalam negeri) dan P_p (Harga pengendalian dalam negeri), di mana P_e dan P_d harus dianggap sama; kalau P_e/P_d , semua kayu pasti akan diekspor. Pada Gambar 4, terlihat bahwa P_p memperbesar subsidi.

ka semakin laju menebang secara ilegal. Sebaliknya, upaya yang harus dilakukan pada dasarnya adalah, bagaimana caranya agar perusahaan HPH tidak lagi memerlukan "subsidi" untuk bisa hidup (*normal profit*). Ini tentunya jika dan hanya jika pemerintah be-

rani "memerangi" kemungkinan timbulnya berbagai jenis biaya eksklusi. Dalam kasus ini, saya sependapat dengan Hariyadi bahwa upaya tersebut tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pasar (bal. 47), melainkan melalui penyempurnaan kelembagaan sistem pengelolaannya secara berhasil dan berdaya guna. Apapun caranya, yang terpenting adalah, sistem kelembagaannya harus mampu menjamin kepastian usaha dan keuntungan, jangka pendek maupun jangka panjang. Da-

lam hal "aturan mainnya", salah satunya, saya sependapat dengan Hariyadi, perlunya pemisahan secara tegas peran swasta dan pemerintah (bal. 49).●

Satria Astana

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Hasil-hasil Hutan.

Hasil penelitiannya banyak dimuat dalam *Journal of Forestry Research* dan *Journal of Forest Products Research*. Selain itu aktif sebagai anggota dari PERSAKI, PPIK dan Komite Nasional Indonesia untuk Badan Energi Dunia.

Kami Amankan Referensi Bidang Perbankan - Keuangan Delapan Tahun ke Belakang.

Amankan Referensi Anda Dengan Bundel Ini.



Harga :

Tahun 1986 : Rp 15.000,'	Tahun 1990 : Rp 15.000,'
Tahun 1987 : Rp 15.000,'	Tahun 1991 : Rp 17.000,'
Tahun 1988 : Rp 15.000,'	Tahun 1992 : Rp 25.000,'
Tahun 1989 : Rp 15.000,'	Tahun 1993 : Rp 30.000,'

Ongkos Kirim : 20 %

Hubungi :

Redaksi Majalah Pengembangan Perbankan
Institut Bankir Indonesia

Jl. Kemang Raya No. 35 Jakarta

Tilp. (021) 7990919; 7992012; 7990855

Fax : 62-21-7990927